

LATAR BELAKANG

Untuk menjaga keteraturan dan ketertiban dalam sebuah masyarakat, sebuah sistem dibuat agar setiap anggota masyarakat memiliki panduan dan kepentingan pribadi dapat berjalan selaras satu sama lain. Ketidakpatuhan anggota masyarakat dalam menerapkan sistem dan aturan tersebut dapat menimbulkan sanksi. KBBI mendefinisikan sanksi sebagai tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.

Tidak terkecuali di Jepang, dalam sistem kemasyarakatan penduduk desanya terdapat sistem pengucilan terorganisir yang disebut *mura hachibu*. *Mura* berarti ‘desa’ atau ‘dusun’ dan *hachibu* berarti ‘delapan bagian’. Delapan bagian yang dimaksud dalam *hachibu* merujuk pada delapan pokok yang meliputi hak dalam penggunaan bahan kebutuhan, penanggulangan bencana, penggunaan sistem irigasi desa, jalan pedesaan, dan penggunaan lahan bersama penduduk desa, Smith (1961). Bila ada seseorang atau sebuah keluarga terkena *mura hachibu*, maka keluarga atau orang tersebut dikucilkan oleh penduduk desa dan tidak dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga desa. Smith (1961).

Mura hachibu dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang pada masa Edo, tetapi sampai saat ini beberapa karya sastra masih menyajikan tindakan ini. Penyajian penerapan sanksi ditemukan dalam manga, drama seri, dan film. Salah satu drama seri yang sangat menggambarkan *mura hachibu* adalah drama seri yang berjudul *Gannibal*.

Dalam buku *The Japanese Rural Community: Norms, Sanctions, and Ostracism*. Robert J. Smith, (1961) dikatakan bahwa sistem pedesaan di Jepang adalah bukti dari perkembangan yang berkelanjutan menuju sistem di bidang industri setelah masa perang hingga sekarang. Sistem pedesaan di Jepang memang tidak secara resmi terdaftar sebagai unit sosial, tetapi terbukti memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Pada sebuah desa atau *mura* setiap keluarga yang tinggal di desa tersebut harus ikut bekerja sama untuk pengelolaan ladang, sawah, dan jalan. Setiap keluarga juga harus menghadiri bahkan ikut membantu upacara pernikahan dan pemakaman. Bila terdapat warga atau keluarga yang tidak bisa menghormati aturan-aturan adat di desa tersebut akan terkena sanksi sosial yang dinamakan *mura hachibu*.

Secara harfiah *mura hachibu* berarti ‘delapan bagian dari desa’ yang mengacu pada pemutusan ikatan komunitas desa dengan warga desa yang tidak dapat menghormati adat istiadat dari desa tersebut. Sanksi *mura hachibu* dijatuhkan kepada pelaku beserta keluarganya yang tinggal di desa tersebut.

Lebih lanjut Smith (1961) dalam bukunya menguraikan *mura hachibu* secara lebih mendalam tentang asal usul munculnya sanksi ini. Menurut pandangannya, secara etimologi makna delapan (*hachi*) pada sanksi ini, sebetulnya merujuk pada sepuluh (*juu*) bagian sanksi yang harus dihindari warga desa.. Yang dimaksud dari ‘bagian’ (*bu*) adalah kesempatan yang diterima oleh warga desa untuk mendapat bantuan atau partisipasi seremonial dari komunitas desa tersebut. Sepuluh bagian dari bantuan dan partisipasi seremonial yang didapat warga adalah (1) ritus peralihan yang terkait dengan siklus kehidupan, (2) upacara pernikahan, (3) upacara kematian

termasuk pemakaman, (4) pendirian bangunan, (5) kebakaran, (6) bantuan bila terkena penyakit, (7) bantuan bencana banjir, (8) perpisahan ketika ada yang ingin melakukan perjalanan yang jauh, (9) upacara kelahiran dan (10) upacara penghormatan kepada leluhur.

Pada bukunya berjudul *The Japanese Rural Community: Norms, Sanctions, and Ostracism*, Smith (1961) juga menuliskan pada masa pemerintahan Tokugawa (1615-1868) *mura hachibu* dilakukan dengan cara pengusiran paksa dari desa terkait. Pada zaman sekarang, warga desa yang terkena sanksi *mura hachibu* tetap diizinkan tinggal di desa tersebut, tetapi hubungan sosial dengan warga desa yang lain akan terputus. Warga desa yang terkena *mura hachibu* tidak boleh menghadiri pertemuan asosiasi dusun ketika keputusan-keputusan penting dibuat dan juga tidak boleh menggunakan fasilitas komunitas yang tersedia di desa tersebut. Namun, pada beberapa kasus, anak-anak dari keluarga yang diasingkan tetap diperbolehkan bersekolah di desa tersebut tetapi akan dijauhi oleh teman-temannya atau bahkan dijauhi oleh lingkungan sekolahnya.

Beberapa tindakan yang menurut Smith dapat memicu seseorang terkena sanksi *mura hachibu*:

1. Melaporkan kegiatan warga desa kepada pihak penegak hukum tanpa sepengetahuan dan persetujuan warga desa.
2. Tidak berpartisipasi dalam upacara-upacara kelompok sekuler atau sakral di desa tersebut, seperti festival kuil dan pertemuan asosiasi desa.
3. Tidak menyetujui keputusan asosiasi desa.
4. Pencurian.

5. Menunjukkan kecenderungan permusuhan dengan warga desa dan membuat pernyataan kritis kepada warga desa yang dianggap merendahkan atau menyinggung warga desa.

Warga desa yang terkena sanksi *mura hachibu* dapat memulihkan statusnya di desa tersebut dengan cara mengajukan pengakuan tertulis atas kesalahan dan permintaan maaf, Bersamaan dengan itu ia juga harus mengajukan permintaan resmi untuk kembali dianggap menjadi warga desa. Permintaan maaf ini biasanya dilakukan setelah negosiasi yang sangat rumit antara warga yang terkena *mura hachibu* dan asosiasi desa melalui jasa perantara. Perantara ini biasanya adalah kerabat dari keluarga pelanggar yang tinggal di luar desa tersebut atau bisa juga seseorang yang berkuasa di desa tersebut untuk menggunakan pengaruhnya dalam memulihkan hubungan kedua belah pihak.

David W. Plath (1968) dalam artikelnya yang berjudul *The Origin of Japanese Commune* sependapat dengan Smith (1961) bahwa di daerah pedesaan di Jepang pengasingan terorganisir disebut *mura hachibu*. Ia juga sependapat dengan Smith (1961) tentang definisi dan makna dari *mura hachibu*. Menurutnya *mura* yang berarti 'desa' dan *hachibu* yang berarti 'delapan bagian pokok'. Menurut tradisi di pedesaan Jepang warga berhak atas 10 bagian kebutuhan pokok termasuk bantuan bencana dan penggunaan lahan secara bersama-sama. Maka dari itu, pelanggaran atau tindakan yang menunjukkan tidak hormat kepada aturan setempat akan dikenai sanksi dengan cara dikucilkan dan akan dicabut hak penggunaan 8 bagian pokok di antaranya lahan sawah dan bantuan bencana.

Pada buku *Modern Japan Origin of the Mind: Japanese Traditions and Approaches to Contemporary Life*, Aleksandr Fedorovich Prasol (2010), menyebutkan *mura hachibu* berasal dari kenyataan bahwa pada zaman dulu penduduk desa bersatu padu saling membantu. Bantuan anggota masyarakat pada diberlakukan pada sepuluh peristiwa tertentu seperti pernikahan, sakit, dan kematian. Penduduk dan komunitas desa akan membantu pelaku *mura hachibu* hanya jika terjadi kebakaran atau pemakaman. Mereka membantunya hanya untuk mencegah potensi bahaya bagi desa karena terkena imbas bangunan yang terbakar atau mayat yang membusuk.

Lebih lanjut Prasol (2010) mengatakan bahwa angka ‘delapan’ dalam *mura hachibu* adalah hukuman yang serius pada saat penanaman padi yang membutuhkan kerja sama antarpenduduk desa. Orang yang terkena sanksi *mura hachibu* hampir sepenuhnya dikucilkan dari kehidupan desa dan tidak dapat betahan lama. Karena hukumannya bersifat perdata, *Mura hachibu* tidak selalu diterapkan secara adil dan konsisten. Hukuman ini sebenarnya ilegal, tetapi tetap diterapkan di beberapa daerah pedesaan di Jepang.

Sepanjang penelusuran penulis, penelitian terdahulu yang menganalisis drama seri *Gannibal* dan/atau praktik penerapan *mura hachibu* dan sejenisnya dilakukan oleh I Gede Yoga Paramartha Duarsa dan I Nyoman Gede Sugiarta Diah Gayatri Sudibya (2020) pada artikel berjudul *Penerapan Sanksi Adat Kasepakang di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung*. Di Bali terdapat sanksi sosial yang sama dengan *mura hachibu* di Jepang yang disebut dengan “*kasepakang*”. *Kasepakang* merupakan sanksi adat Bali yang mengucilkan penerima sanksi sebagai

warga desa. Ia dikucilkan, diasingkan, dan diberhentikan keikutsertaannya dari kegiatan-kegiatan di desa. Pada tahun 2018 seorang kepala keluarga bernama I Nyoman Darna beserta keluarga mendapatkan sanksi adat *kasepakang* karena dianggap melanggar kesepakatan masyarakat dengan menggugat tanah yang telah disertifikatkan oleh Desa Adat. Sanksi ini terjadi akibat adanya perbedaan pendapat dengan masyarakat, sehingga dikenakan sanksi *kasepakang*. Perbedaan penelitian Duarsa dan Sudibya (2020) dengan penelitian ini terletak pada data dan teori yang digunakan.

Terjadinya penerapan sanksi *mura hachibu* di desa Jepang yang muncul dalam drama seri *Gannibal* ini menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Drama seri *Gannibal* yang diproduksi pada tahun 2022, bagi penulis mengindikasikan adanya praktik *mura hachibu* dalam masyarakat Jepang hingga kini. Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa penyebab terjadinya penerapan sanksi *mura hachibu* dan bagaimana bentuk sanksi *mura hachibu* tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Sugiyono. 2005).

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan tahapan penelitian sebagai berikut. Pertama terlebih dahulu mencari penelitian terdahulu dan artikel yang